



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk 64412

Telp. (0358) 321196 - 321712 Fax. (0358) 321196

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023. LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pencapaian RENSTRA Tahun 2018 – 2023.

LKjIP Tahun Anggaran 2023 juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah dilaksanakan dan merupakan sumber informasi ke arah perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui usaha keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di bidang pengawasan, target dapat dicapai dengan baik

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya saran untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program ke depan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023,

Ringkasan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan dengan indikator kinerja Level Maturitas SPIP target Level 3
2. Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart target 32%

Walaupun capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 telah tercapai namun dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja masih terdapat permasalahan/hambatan antara lain :

1. Kurangnya komitmen level top manajemen terkait Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko.
2. Kesadaran pemilik risiko untuk mengidentifikasi risiko masih rendah Kurang optimalnya satgas SPIP dalam penyelenggaraan SPIP
3. Belum dukungnya kegiatan penyelenggaraan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah
4. Kurang optimalnya satgas SPIP dalam penyelenggaraan SPIP
5. Fungsi konsulting belum dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah secara optimal

Langkah-langkah yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan kinerja antara lain :

1. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
2. Menyelenggarakan Bimtek Manajemen Risiko dalam Penyusunan CEE dan RSP Pemerintah Kabupaten Nganjuk
3. Berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD terkait pendanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP pada masing-masing Perangkat Daerah
4. Menyusun struktur pengelola risiko tingkat pemerintah daerah
5. Melaksanakan Workshop Bagi Satuan Tugas dan Asesor Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
6. Melaksanakan klinik konsultasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Landasan Hukum.....	2
D. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	2
E. Isu Strategis.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Ikhtisar/ ringkasan Renstra/ Renja.....	9
B. Perjanjian Kinerja Tahunan.....	30
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Capaian Kinerja	32
a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.....	32
1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.....	32
2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra.....	34
3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standard Nasional.....	35
4) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	40
5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
6) Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.....	43
B. Realisasi Anggaran.....	53
IV. PENUTUP.....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Perjanjian Kinerja	
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
C. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut salah satunya disajikan dalam laporan hasil evaluasi kinerja tribulan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun Anggaran 2023.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah :

- 1) Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun;
- 2) Sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

D. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

a) Fungsi

Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati;
- h. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

b) Susunan Dan Struktur Organisasi

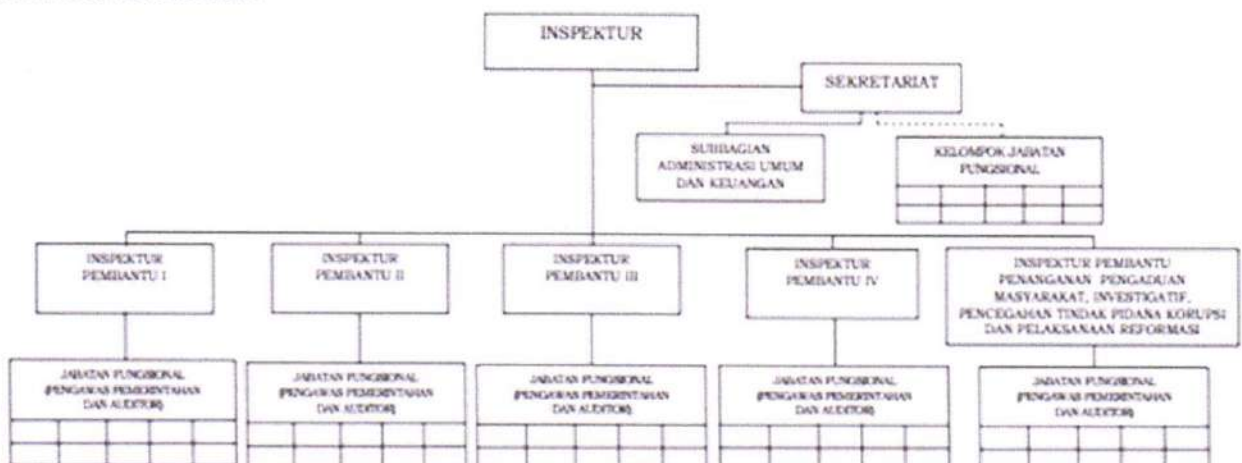
Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :

1. Inspektur
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Reformasi Birokrasi
8. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD.

Bagan Susunan Organisasi :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



Dari bagan struktur organisasi di atas, SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia (SDM) APIP
Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2023

No	NAMA	NIP	GOL	PEND.	JABATAN
1	Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si	19661005 198703 1 010	IV/d	S2	Inspektur Daerah
2	ANANG TRIYANTO, SH. M.Si	19660710 199202 1 001	IV/b	S2	Sekretaris
3	Drs. MOH. MIFTAQL MUJIB, MM	19670315 199203 1 010	IV/b	S2	Inspektur Pembantu II
4	FEFRI HENDRO WASONO, S.Sos, MM	19750803 199803 1 006	IV/b	S2	Inspektur Pembantu IV
5	SUDARMONO, AP, MM	19760213 199412 1 001	IV/b	S2	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, PPTK dan Reformasi Birokrasi
6	Drs. SUYANTO	19640404 199003 1 018	IV/b	S1	PPUPD Madya
7	Drs. EKO CAHYONO, S.Sos. M.AP,	19670730 199302 1 003	IV/a	S2	Inspektur Pembantu III
8	Dra. TITIK SUPRIHATIN, M.Si	19650530 199203 2 005	IV/a	S2	PPUPD Madya
9	SUTANTO ADI S, SE	19660620 199602 1 002	IV/a	S1	PPUPD Madya
10	RIZKY RUSMAWATI, S.STP, M.Si, CRMO	19850110 200312 2 002	IV/a	S2	Auditor Madya
11	DWI TRISTANTI, SE,M.AP	19720302 20060 4 2 016	III/d	S2	Inspektur Pembantu I
12	SRI SUDEWI, SE	19670205 198603 2 002	III/d	S1	Analisis Kebijakan Muda
13	IDA AYU DEWI, SE	19721113 200801 2 007	III/d	S1	Kasubbag Umum dann Keuangan
14	LUTFI ASHARI, SE	19790307 200604 1 014	III/d	S1	Auditor Muda
15	RENY PRIHASTUTI, SE	19720312 200604 2 027	III/d	S1	Auditor Muda
16	INTAN ESY NURWAYA, ST	19800327 200903 2 004	III/d	S1	Auditor Muda
17	WAHYU DWIPRASETYA, SE	19791017 200901 1 006	III/d	S1	Auditor Muda
18	NURIMA JIWAYANTI, SH	19870910 201001 2 018	III/d	S1	Auditor Muda
19	NOVARINA DIAN WARDANI, SP	19781123 201001 2 002	III/c	S1	Auditor Muda
20	SUMARYANA, SE	19710222 200604 1 008	III/c	S1	PPUPD Muda
21	PIYA FHATORONI, S.Kom	19821021 201001 1 015	III/c	S1	Pranata Komputer Muda
22	ARI WIDODO, SE	19840301 200604 1 008	III/c	S1	Auditor Muda
23	OKKY HAYU PAMUJA, S.STP, M.Si	19901016 201206 1 013	III/c	S2	Perencana Ahli Muda
24	MUNDARWATI, SE	19770908 201101 2 003	III/c	S1	Auditor Muda
25	ANAS NASRULLAH, A.Md	19820420 200903 1 006	III/b	S1	Auditor Pertama
26	ABDUL HADI, A.Md	19800408 201101 1 008	III/b	D3	Pengelola Barang Milik Daerah
27	ZANUAR ACHMAD AFANDI, S.Akun	19910102 201903 1 009	III/b	S1	Auditor Pertama
28	HENI PURWANTI, SE, CGAA	19841102 201903 2 011	III/b	S1	Auditor Pertama
29	DENADA ANGGIA LALITA, SE, CGAA	19841017 201903 2 011	III/b	S1	Auditor Pertama
30	SHINTA MEIGA MAYANGSARI, SE	19890515 202012 2 004	III/a	S1	Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan
31	RIZKI SEPTIANI, SE	19970909 202012 2 007	III/a	S1	Auditor Pertama

No	NAMA	NIP	GOL	PEND.	JABATAN
32	KARTIKA IKA WULANDARI, SE	19940127 202012 2 006	III/a	S1	Auditor Pertama
33	GAGOT SULISTYO, S.Ak	19960728 202012 1 004	III/a	S1	Bendahara Pengeluaran
34	ZAM PERMITASARI, S.Ak	19970829 202012 2 004	III/a	S1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
35	SAKA RAHARDIAN, ST	19920910 202203 1 003	III/a	S1	Calon Auditor Pertama
36	FESTYAGUSTI HARDIKASARI, ST	19890801 202203 2 001	III/a	S1	Calon Auditor Pertama
37	WIRAWAN YUDA PRIHATAMA, ST	19931009 202203 1 001	III/a	S1	Calon Auditor Pertama
38	RIZKI NURUL FADHILAH, A.Md.T	19980327 202203 2 006	II/c	D3	Calon Auditor Terampil
39	BAROKAH SAKTI SATRI W, A.Md	19950406 202203 1 002	II/c	D3	Calon Auditor Terampil
40	RIDHO AGUNG LAKSONO, A.Md. Ars	19980801 202203 1 002	II/c	D3	Calon Auditor Terampil
41	ARIQ HASYEMI RAFSANJANI, A.Md.t	19990613 202203 1 002	II/c	D3	Calon Auditor Terampil
42	AGI WAHYU SALINDRA, A.Md.Ak.	19970611 202203 1 002	II/c	D3	Calon Auditor Terampil
43	APRILIA FAJAR ADHANI, A.Md	19770418 202203 2 004	II/c	D3	Calon Auditor Terampil
44	DINA JUANITA TRI SANTI, A.Md	19960624 202203 2 003	II/c	D3	Calon Auditor Terampil
45	LAILA KHOTAMIL NUR AZIZAH, A.Md	19951018 202203 2 005	II/c	D3	Calon Auditor Terampil
46	CHUSNUL KHOIRIYAH, A.Md	19950526 202203 2 006	II/c	D3	Calon Auditor Terampil
47	ARMILA MAZIDATUR ROSYIDAH, A.Md	19941214 202203 2 002	II/c	D3	Calon Auditor Terampil
48	YOLANDA AFRIYANTI, A.Md	19920402 202203 2 002	II/c	D3	Calon Auditor Terampil
49	NINDYA YULAQFITA RIFAMATU FIRIZKI, A.Md.T	19990729 202203 2 004	II/c	D3	Calon Auditor Terampil
50	JONO	197112252007011019	II/c	SLTA	Pengemudi
51.	SARIJO	19811230 202001 1 003	II/b	SLTA	Pengadministrasi Umum

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2023

TABEL 1.2
REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

Klasifikasi		Jumlah Total	Laki-laki	Perempuan
A.	Status Kepegawaian			
	- ASN	51	26	25
	- THL	11	5	6
	Jumlah	62	31	31
B.	Pendidikan ASN			
	- Magister (S2)	10	7	3
	- Sarjana (S1)	26	12	14
	- Sarjana Muda/Diploma III	13	5	8
	- Diplioma II	0	0	0
	- Diploma I	0	0	0
	- SLTA	2	2	0
	- SLTP	0	0	0
	- SD	0	0	0
	Jumlah	51	26	25
C.	Pendidikan THL			
	- Sarjana (S1)	7	1	6
	- SLTA	4	4	0

Klasifikasi		Jumlah Total	Laki-laki	Perempuan
	Jumlah	11	5	6
D,	Pangkat dan Golongan			
-	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	1	0
-	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	0	0
-	Pembina Tk. I (IV/b)	5	5	0
-	Pembina (IV/a)	4	2	2
-	Penata Tk. I (III/d)	8	2	6
-	Penata (III/c)	6	4	2
-	Penata Muda Tk. I (III/b)	5	3	2
-	Penata Muda (III/a)	8	3	5
-	Pengatur Tk. I (II/d)	0	0	0
-	Pengatur (II/c)	13	4	9
-	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	1	0
-	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
-	Juru Tk. I (I/d)	0	0	0
-	Juru (I/c)	0	0	0
-	Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0
-	Juru Muda (I/a)	0	0	0
	Jumlah	51	25	26
E	Pejabat Struktural			
-	Eselon II	1	1	0
-	Eselon III	6	5	1
-	Eselon IV	1	0	1
	Jumlah	8	6	2
F.	Pejabat Fungsional			
-	JFA	30	12	18
-	PPUPD	4	3	1
-	Perencana	1	1	0
-	Analisis Kebijakan	1	0	1
-	Pranata Komputer	1	1	0
	Jumlah	37	17	20
G.	Jabatan Pelaksana			
-	Pelaksana	6	4	2
	Jumlah	6	4	2

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk

E. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari KKN;
2. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
3. Rendahnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
4. Struktur kelembagaan APIP kurang mendukung independensi dan obyektivitas dalam pelaksanaan pengawasan;

5. Peran APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum efektif;
6. Tuntutan terhadap peningkatan Kapabilitas APIP;
7. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam pengawasan intern bagi tata Kelola pemerintahan belum memadai ;

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 069/2195/411.000/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Sistematika Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk triwulan I sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, gambaran umum, dan Isu-isu Strategis (strategic issued yang sedang dihadapi organisasi)

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan tentang :

- a. Rencana Strategi, Rencana Kinerja Tahunan
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK

Pada sub bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;
 - 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun – tahun sebelumnya
 - 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra
 - 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standard Nasional;
 - 4) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
 - 5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

6) Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang
Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV - PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. IKHTISAR/RINGKASAN RENSTRA/ RENJA

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk memuat tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mengampu misi ke 2 (dua) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran, yang akan diwujudkan melalui strategi dan kebijakan untuk mencapainya. Adapun visi, misi, dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

2.1 Visi, Misi Kepala Daerah

Tabel 2.1.1
Visi/Misi, Sasaran Daerah Dalam Renstra
Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2018-2023

Visi	Misi	Sasaran Daerah
1	2	3
Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)	Meningkatkan Kinerja Birokrasi Bersih, Profesional dan Akuntabel Demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk Yang Efektif dan Efisien Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk 2018-2023

Berangkat dari Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menetapkan sasaran Perangkat Daerah yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan dengan indikator Level Maturitas Sistem Pengendalian Pengendalian Intern (SPIP).

2.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

2.2.1 Tujuan

Dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2018 – 2023 telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.2
Tujuan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Level Maturitas SPIP	Level	2	2	2	3	3

Sumber : Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2018-2023

2.2.2 Sasaran

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggara n Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Persen (%)	NA	NA	NA	28	32

Sumber : Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk 2018-2023

Tahun 2022 dan 2023 Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada K/L/D, dengan tahapan :

- 1) Tahap Persiapan Penilaian Mandiri:
 - Penetapan OPD PM SPIP
 - Upload Template Import (Informasi Umum Sasaran Pemda, Daftar OPD, Sasaran OPD, Sasaran Program Kegiatan OPD)
- 2) Tahap Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri

Tahap penilaian mandiri dilaksanakan oleh masing-masing OPD terpilih, sedangkan Penjaminan Kualitas dilaksanakan Oleh APIP. Skor diperoleh secara akumulasi melalui aplikasi SPIP Terintegrasi dan tidak menampilkan skor per perangkat Daerah.
- 3) Tahap Evaluasi atas Penilaian Mandiri oleh BPKP

proses Evaluasi atas Penilaian Mandiri dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Ekspose oleh BPKP Pusat.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Sebagai salah satu rujukan penting dalam rencana strategis, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran Perangkat Daerah akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dibutuhkan strategi dan arah kebijakan sebagai prioritas Perangkat Daerah. Strategi dan arah Kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut

Tabel 2.1.4
Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Renstra
Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2018-2023

Strategi	Arah Kebijakan
1	2
a. Sinkronisasi program pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government). b. Optimalisasi Teknologi Informatika dalam pelaksanaan pengawasan (SIM HP). c. Meningkatkan kualitas temuan dan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah	a. Meningkatkan perencanaan pengawasan dengan pengawasan berbasis risiko b. Mengefektifkan mutu pengawasan secara profesional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah c. Mengawal tercapainya opini WTP d. Peningkatan penerapan SPIP Perangkat Daerah e. Mengawal Peningkatan implementasi SAKIP

Strategi			Arah Kebijakan		
1			2		
d. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			f. Memberikan kesempatan kepada APIP untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepengawasan		
e. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai mitra dalam pencapaian tujuan bagi perangkat daerah			g. Meningkatkan level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah		
f. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit			Optimalisasi sumberdaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat		

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2018-2023

2.4. Rencana Program dan Kegiatan, indikator Kinerja

Tabel 2.1.5
Program/Kegiatan Tahun 2018 – 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah					90%	8.853.505.500	90%	9.638.700.000	90%	-
	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah *)					-	-	90%	9.638.700.000	90%	12.171.177.930
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu					85%	10.207.000	85%	22.000.000	90%	-
	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu*)					-	-	85%	22.000.000	90%	21.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun tepat waktu					3 dokumen	2.791.000	2 dokumen	4.000.000	-	-
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*)					-	-	2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	6.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu					-	-	1 dokumen	2.500.000	-	-
	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD*)					-	-	1 dokumen	2.500.000	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun tepat waktu					-	-	1 dokumen	2.500.000	-	-
	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD*)					-	-	1 dokumen	2.500.000	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu					7 laporan	7.416.000	7 laporan	10.000.000	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*)					-	-	7 laporan	10.000.000	7 laporan	15.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah					-	-	1 dokumen	3.000.000	-	-
	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah*)					-	-	1 laporan	3.000.000	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun					100%	7.367.184.000	100%	7.297.200.000	100%	-
	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun*)							100%	7.297.200.000	100%	7.204.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN					12 bulan	7.365.696.000	12 bulan	7.000.000.000	-	-
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*)					-	-	54 orang	7.000.000.000	54 orang/bln	7.200.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi					-	-	13 orang	273.000.000	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN*)					-	-	108 dokumen	273.000.000	-	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD					-	-	2 orang	19.200.000	-	-
	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*)					-	-	52 dokumen	19.200.000	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu					1 laporan	1.488.000	1 laporan	2.500.000	-	-
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD*)					-	-	1 laporan	2.500.000	1 laporan	4.000.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen permintaan pemeriksaan					-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu					-	-	6 laporan	2.500.000	-	-
	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran					-	-	6 laporan	2.500.000	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
		2019		2020		2021		2022		2023		
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	steran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triulan/semesteran SKPD*)											
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun					75%	360.775.200	80%	442.500.000	80%		
	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun*)					-		80%	442.500.000	80%	1.035.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan					-	-	50 orang	22.500.000	-		
	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya*)					-	-	1 paket	22.500.000	162 paket	85.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	APIP yang mengikuti pelatihan					45 orang	250.641.000	45 orang	300.000.000	-		
	Terlaksananya senam secara rutin					11 bulan		11 bulan		-		
	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*)					-	-	45 orang	300.000.000	54 orang	750.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi					30 orang	33.605.000	30 orang	40.000.000	-		

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan*)					-	-	30 orang	40.000.000	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP B dan BB					50 OPD	76.529.200	50 OPD	80.000.000	-	-
	Jumlah pendampingan yang dilakukan					3 kali		3 kali		-	
	Jumlah peserta bimtek					40 orang		40 orang		-	
	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan*)					-	-	40 orang	80.000.000	54 orang	200.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah					90%	386.202.300	90%	688.000.000	90%	-
	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah *)					-	-	90%	688.000.000	90%	539.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik					15 jenis	7.000.000	17 jenis	10.000.000	-	-
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan*)					-	-	2 paket	10.000.000	2 paket	15.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan					15 buah	8.904.980	20 buah	10.000.000	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*)					-	-	9 paket	10.000.000	9 paket	15.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan alat rumah tangga					15 jenis	4.998.250	18 jenis	7.000.000	-	-
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan*)					-	-	2 paket	7.000.000	2 paket	10.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang diadakan					25 jenis	133.526.570	40 jenis	150.000.000	-	-
	Tersedianya makan dan minum					11 bulan		11 bulan		-	-
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*)					-	-	3 paket	150.000.000	3 paket	170.000.000
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik					-	-	1 paket	200.000.000	-	-
	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD*)					-	-	1 paket	200.000.000	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan					30.000 lembar	34.965.000	7 jenis cetakan dan 30.000 penggandaan	40.000.000	-	-
	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan*)					-	-	2 paket	40.000.000	2 paket	50.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan perundangan yang diadakan					3 jenis	5.000.000	6 jenis	6.000.000	-	-
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan*)					-	-	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	9.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu yang diadakan					11 bulan	12.787.500	11 bulan	15.000.000	-	-
	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu*)					-	-	12 laporan	15.000.000	12 laporan	20.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu yang diadakan					11 bulan	179.020.000	11 bulan	200.000.000	-	-
	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan / dihadiri					36 kegiatan		36 kegiatan		-	
	Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan					50 OPD		50 OPD		-	
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*)					-	-	36 laporan	200.000.000	36 laporan	200.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya pengamanan arsip di Perangkat Daerah					-	-	1 kegiatan	50.000.000	-	-

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD*)					-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah					80%	233.969.400	80%	670.000.000	85%	-
	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah *)							80%	670.000.000	85%	2.447.677.930
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan					-	-	1 unit roda 4 (empat)	300.000.000	-	-
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan*)					-	-	1 unit	300.000.000	5 unit	1.250.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan					-	-	4 jenis	120.000.000	-	-
	Jumlah paket mebel yang disediakan*)					-	-	35 unit	120.000.000	35 unit	120.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang diadakan					16 buah	233.969.400	21 buah	250.000.000	-	-
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan*)					-	-	5 unit	250.000.000	94 unit	1.077.677.930
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah					90%	207.100.000	90%	179.000.000	90%	-

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah *)					-	-	90%	179.000.000	90%	224.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses					700 surat	8.500.000	800 surat	9.000.000	-	-
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*)					-	-	4 laporan	9.000.000	4 laporan	9.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan listrik dan telepon					12 bulan	144.600.000	12 bulan	110.000.000	-	-
	Penambahan daya listrik					41500 VA		-		-	
	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan*)					-	-	4 laporan	110.000.000	4 laporan	150.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa kebersihan 3000 m2					12 bulan	54.000.000	12 bulan	60.000.000	-	-
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*)					-	-	4 laporan	60.000.000	4 laporan	65.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi					90%	288.067.600	90%	340.000.000	90%	-
	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi *)					-	-	90%	340.000.000	90%	700.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara					20 unit	99.999.600	20 unit	120.000.000	-	-
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya*)					-	-	14 unit	120.000.000	15 unit	250.000.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara					20 unit	13.000.000	20 unit	20.000.000	-	-
	Jumlah mebel yang dipelihara*)					-	-	30 unit	20.000.000	30 unit	25.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara					37 unit	70.068.000	37 unit	75.000.000	-	-
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara*)					-	-	45 unit	75.000.000	45 unit	75.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara					1200 m2	105.000.000	1200 m2	125.000.000	-	-
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi*)					-	-	15 unit	125.000.000	16 unit	350.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PKPT yang dilaksanakan					100%	654.506.500	100%	1.009.696.000	100%	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase PKPT yang dilaksanakan*)					-	-	100%	1.009.696.000	100%	1.250.000.000
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya pengawasan internal					100%	596.586.500	100%	934.696.000	100%	-
	Terselenggaranya pengawasan internal*)					-	-	100%	934.696.000	100%	850.000.000
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor					4 OPD	157.828.000	8 OPD	300.000.000	-	-
	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah*)					-	-	8 laporan	300.000.000	8 laporan	200.000.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor					13 OPD	21.630.000	10 OPD	124.696.000	-	-
	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah*)					-	-	10 laporan	124.696.000	10 laporan	150.000.000
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen LKJIP yang direviu					-	8.836.000	-	10.000.000	-	-
	Jumlah dokumen LPPD yang direviu					1 dokumen		1 dokumen		-	
	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja*)					-	-	2 laporan	10.000.000	2 laporan	50.000.000
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen LKPD yang direviu					1 dokumen	43.643.000	1 dokumen	50.000.000	-	-
	Jumlah OPD yang direviu					30 OPD		30 OPD		-	
	Jumlah dokumen RKA PD					50 OPD		50 OPD		-	
	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan*)					-	-	119 laporan	50.000.000	119 laporan	50.000.000
Pengawasan Desa	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor					264 desa	100.980.000	264 desa	150.000.000	-	-

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah laporan hasil pengawasan desa*)					-	-	100 laporan	150.000.000	75 laporan	100.000.000
Kerjasama Pengawasan Internal	Gelar pengawasan yang dilakukan					1 kali	38.372.000	1 kali	50.000.000	-	-
	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi sistem dan prosedur pengawasan					100 ASN		100 ASN		-	
	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk*)					-	-	1 kesepakatan	50.000.000	1 kesepakatan	50.000.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inventarisasi kode temuan hasil pengawasan					100%	225.297.500	100%	250.000.000	-	-
	Jumlah evaluasi yang dilakukan					4 kali		4 kali		-	
	Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang selesai					95%		95%		-	
	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP*)					-	-	6 dokumen	250.000.000	6 dokumen	250.000.000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggara any pengawasan dengan tujuan tertentu					95%	57.920.000	95%	75.000.000	95%	-
	Terselenggara any pengawasan dengan tujuan tertentu*)					-	-	95%	75.000.000	95%	400.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pelimpahan kasus yang ditangani					90%	11.800.000	90%	25.000.000	-	-
	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani*)					-	-	4 laporan	25.000.000	8 laporan	200.000.000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kasus pengaduan yang ditangani					96%	46.120.000	96%	50.000.000	-	-
	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor					4 OPD		4 OPD			
	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu*)					-	-	4 laporan	50.000.000	20 laporan	200.000.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target					75%	357.684.000	80%	470.000.000	80%	-
	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target*)					-	-	80%	470.000.000	80%	770.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan					100%	43.384.000	100%	90.000.000	100%	-
	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan*)					-	-	100%	90.000.000	100%	150.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Pengawasan yang disusun					-	-	2 dokumen	30.000.000	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun*)					-	-	2 rekomendasi	30.000.000	2 rekomendasi	50.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Cakupan klinik konsultasi					6 kecamatan	43.384.000	6 kecamatan	60.000.000	-	-
	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun*)					-	-	1 rekomendasi	60.000.000	1 rekomendasi	100.000.000
Pendampingan dan Asistensi	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi					85%	314.300.000	85%	380.000.000	90%	-
	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi*)					-	-	85%	380.000.000	90%	620.000.000
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Evaluasi dan pemantauan SPIP					30 OPD	73.498.500	30 OPD	90.000.000	-	-
	Jumlah ekspose pengawasan komprehensif					10 kali		10 kali		-	
	Jumlah dokumen SAKIP yang dievaluasi					50 dokumen		50 dokumen		-	
	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah*)					-	-	50 OPD	90.000.000	50 OPD	150.000.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi					30 OPD	34.874.000	50 OPD	40.000.000	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi*)					-	-	30 OPD	40.000.000	30 OPD	100.000.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaporan gratifikasi pada perangkat daerah yang ditangani					95%	173.915.500	100%	200.000.000	-	-
	Terlaksananya asistensi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi					14 OPD		14 OPD		-	
	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi satgas saberpungli					12 bulan		12 bulan		-	
	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi*)					-	-	3 kegiatan	200.000.000	3 kegiatan	220.000.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang didampingi					50 OPD	32.012.000	50 OPD	50.000.000	-	-
	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas*)					-	-	50 OPD	50.000.000	50 OPD	150.000.000

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2018-2023

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Nganjuk mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan mengacu kepada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 -2023. Didalam Rencana Kinerja Tahunan dituangkan rencana tingkat hasil yang diharapkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik itu kegiatan utama maupun kegiatan penunjang dalam satu tahun. Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dituangkan pada setiap kegiatan yang masing-masing kegiatan memiliki indikator yang berbasis kinerja.

Tabel 2.1.6
Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	2023	
				Target	Rp
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah (90%)	90%	10.294.213.389
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100%	7.389.794.000
	1.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54 org/bulan	7.380.824.000
	1.b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap	8.970.000
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%	605.905.000
	2.a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	118 paket	65.636.000
	2.b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54 orang	388.942.000
	2.c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	54 orang	151.327.000
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	531.816.170
	3.a	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	13.086.952
	3.b	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	11.824.318
	3.c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	14.519.000

No	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	2023	
				Target	Rp
	3.d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	131.246.900
	3.e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	23.351.500
	3.f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 lap	21.962.500
	3.g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 lap	315.825.000
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan Pemrintaha Daerah	100%	883.527.807
	4.a	Pengadaan Mebel	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	75 unit	188.215.541
	4.b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	193 unit	695.312.266
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa umum dan penunjang urusan perangkat daerah	90%	246.975.000
	5.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 lap	9.075.000
	5.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 lap	142.200.000
	5.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 lap	95.700.000
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	90%	636.195.412
	6.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeriksaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	184.086.900
	6.b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	28 unit	18.000.000
	6.c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	47.240.000
	6.d	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	386.868.512
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase PKPT yang dilaksanakan	100%	670.134.500
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Terselenggaranya pengawasan internal	100%	559.054.500
	1.a	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	3 lap	98.864.000
	1.b	Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 lap	81.010.000
	1.c	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 lap	18.255.000
	1.d	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 lap	46.749.000

No	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	2023	
				Target	Rp
1.e	Pengawasan Desa		Jumlah laporan hasil pengawasan desa	75 lap	68.680.000
1.f	Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	21.826.000
1.g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP)	6 dok	223.670.500
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95%	111.080.000
2.a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah ditangani	4 lap	33.400.000
2.b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 lap	77.680.000
C.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80%	786.018.800
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	173.160.000
1.a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	16.650.000
1.b	Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi pengawasan		Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	156.510.000
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi	90%	612.858.800
2.a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	50 OPD	418.094.800
2.b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	30 OPD	55.834.000
2.c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 keg.	119.218.000
2.d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	50 OPD	19.712.000

Sumber : DPA Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2023

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang ditandatangani antara Bupati Nganjuk dengan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.1.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	32 %

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	10.129.441.213,00	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	733.444.500,00	DAU
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	479.861.800,00	DAU
	Jumlah	11.342.747.513,00	

Tabel 2.1.8
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Perubahan)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	32 %

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	10.294.213.389,00	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	670.134.500,00	DAU
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	786.018.800,00	DAU
	Jumlah	Rp. 11.750.366.689,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. Fungsi *organizing* seluruh sumber daya dalam koridor prosedur yang telah ditetapkan yang menjadi dasar melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan pembinaan sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Diakhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua pelaksanaan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggungjawaban penggunaan seluruh sumberdaya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

3.1 Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Pengukuran target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang disusun tahun 2023 merupakan ketercapaian atas indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran setiap tahunnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023. Analisis capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 sebagai berikut :

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

1) Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun – tahun sebelumnya

Kinerja pembangunan daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan dengan indikator Level Maturitas SPIP merupakan tujuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk

Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dengan tahun – tahun sebelumnya sebagai berikut :

b) Kinerja Tujuan

Realisasi kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Level Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3

Berdasarkan tabel diatas kinerja Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan dengan indikator kinerja Level Maturitas SPIP dengan target level 2 di tahun 2021 terealisasi level 2 merupakan hasil dari Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2018 dikarenakan s.d Tahun 2021 penilaian SPIP merupakan penilaian baseline dan hasil penilaian belum sampai dengan ekspose di BPKP Pusat. Pada Tahun 2022 dan 2023 dengan target SPIP level 3 terealisasi level 3 sehingga capaian kinerja 100%. Maka pada tahun 2023 target indikator kinerja Level Maturitas SPIP dengan target level 3 **“Telah Tercapai”**

c) Indikator Sasaran

Realisasi kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	NA	28%	32%	5%*	29%	36%

Analisis capaian kinerja sasaran meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dengan indikator kinerja persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart adalah sebagai berikut :

Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak menetapkan indikator perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sebagai indikator Sasaran (NA) pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan penilaian baseline maturitas SPIP terhadap 10 Perangkat Daerah atau 5% dari jumlah Perangkat Daerah.

Tahun 2022 Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart sebanyak 14 Perangkat Daerah yang dilakukan penjaminan kualitas atas 33 OPD yang melaksanakan penilaian mandiri, sehingga realisasi tahun 2022 sebesar 36% dari target 32%(14 OPD) dan capaian kinerja sebesar 112,5%.

Tahun 2023 Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart sebanyak 18 Perangkat Daerah yang melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan Kualitas sehingga realisasi sebesar 36% dari target 32% dan capaian kinerja 112,5%.

Dengan demikian sasaran "Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel" dengan indikator kinerja "Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP Sesuai Standart" Tahun 2023 "**Telah Tercapai**".

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Dalam menyusun tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk ditetapkan dengan perencanaan dalam jangka waktu 5 tahun atau disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) Periode Renstra 2018-2023.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk disusun bertujuan untuk memberikan arah lebih baik bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dan sebagai ukuran keberhasilan dari capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Pada Periode Renstra (Tahun 2023) sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)	Realisasi Tahun 2023	Capaian
1	2	3		8		
1.	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
2.	Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Persentase (%)	32%	36%	112,5%

Jika dibandingkan dengan Target Akhir Periode Renstra (2023) maka realisasi kinerja tujuan dan sasaran tahun 2023 **telah mencapai target**.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standard Nasional

Dalam rangka melakukan evaluasi dan sebagai pembanding dalam upaya pencapaian target indikator Level Maturitas SPIP khususnya pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu melakukan pembandingan terhadap Maturitas SPIP dengan Standard Nasional. Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Nganjuk bila dibandingkan dengan Maturitas SPIP pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Dengan Standard Nasional

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Standard Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2023
1.	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
2.	Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	-	36%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja tujuan "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan" dengan indikator kinerja "Level Maturitas SPIP" telah mencapai standart nasional yaitu **level 3**.

Sebagai pendukung terhadap capaian indikator kinerja Level Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara nasional pada tahun 2023, berikut sesuai dengan Surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.09.03/S.822/D3/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023.



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
 Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120
 Telepon 021-85910031 (hunting) Faksimile 021-85910302

Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 28 Desember 2023
 Lampiran : Dua Berkas
 Hal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Yth. Seluruh Kepala Perwakilan BPKP di tempat

Memperhatikan surat kami nomor: DL.04/S-613/D3/04/2023 tanggal 22 September 2023 hal Percepatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 dan surat nomor: PE.09.03/S-782/D3/04/2023 tanggal 29 November 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan K/L/D Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Penilaian SPIPT dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Urutan	Populasi	Hasil Evaluasi											
		NA	%	Level 1	%	Level 2	%	Level 3	%	Level 4	%	Level 5	%
Provinsi													
1) SPIP	38	4	10,53%	0	0,00%	4	10,53%	30	78,95%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	38	4	10,53%	0	0,00%	14	36,84%	20	52,63%	0	0,00%	0	0,00%
3) EPK	38	4	10,53%	2	5,26%	19	50,00%	13	34,21%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	38	1	2,63%	2	5,26%	3	7,89%	32	84,21%	0	0,00%	0	0,00%
Kab/kota													
1) SPIP	508	12	2,36%	25	4,92%	140	27,56%	331	65,18%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	508	12	2,36%	37	7,28%	341	67,13%	118	23,23%	0	0,00%	0	0,00%
3) EPK	508	12	2,36%	68	13,39%	395	77,76%	33	6,50%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	508	0	0,00%	27	5,31%	118	23,23%	363	71,46%	0	0,00%	0	0,00%

sumber: diolah dari data hasil evaluasi BPKP

Untuk selanjutnya agar Kepala Perwakilan dapat menerbitkan laporan Hasil Evaluasi untuk masing-masing pemerintah daerah. Rincian skor dan level masing-masing pemerintah daerah tersaji dalam lampiran 1 dan 2.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,
Dianawatiangani, Jakarta elektronik digital

Raden Suhartono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama BPKP
2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
3. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polihukum PMK
4. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara
5. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRU		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
224	P/W13	17	Kabupaten Situbondo	3.250	3	2.913	2	2.890	2	3.000	3
225	P/W13	18	Kota Probolinggo	3.243	3	2.939	2	2.860	2	3.000	3
226	P/W13	19	Kota Kediri	3.203	3	2.988	2	2.890	2	3.000	3
227	P/W13	20	Kabupaten Gresik	3.267	3	2.913	2	2.930	2	3.070	3
228	P/W13	21	Kabupaten Kediri	3.112	3	2.464	2	2.680	2	3.210	3
229	P/W13	22	Kabupaten Sidoarjo	3.150	3	2.813	2	2.930	2	3.000	3
230	P/W13	23	Kabupaten Pamekasan	3.247	3	2.951	2	2.930	2	3.000	3
231	P/W13	24	Kabupaten Sumenep	3.161	3	3.020	3	2.850	2	3.060	3
232	P/W13	25	Kota Madun	3.252	3	2.856	2	2.690	2	3.000	3
233	P/W13	26	Kabupaten Magetan	3.203	3	2.788	2	2.770	2	3.000	3
234	P/W13	27	Kabupaten Trenggalek	3.100	3	2.782	2	2.850	2	2.620	2
235	P/W13	28	Kabupaten Ngawi	3.224	3	2.951	2	2.940	2	3.000	3
236	P/W13	29	Kabupaten Tuban	3.259	3	2.926	2	2.930	2	3.000	3
237	P/W13	30	Kabupaten Madun	3.304	3	2.989	2	2.930	2	2.710	2
238	P/W13	31	Kota Pasuruan	3.090	3	3.001	3	2.530	2	3.000	3
239	P/W13	32	Kota Batu	3.277	3	3.076	3	2.930	2	2.900	2
240	P/W13	33	Kabupaten Nganjuk	3.169	3	3.038	3	2.790	2	3.000	3
241	P/W13	34	Kabupaten Jember	3.059	3	2.676	2	2.440	2	2.910	2
242	P/W13	35	Kabupaten Sampang	3.157	3	3.010	3	2.630	2	3.000	3
243	P/W13	36	Kabupaten Mojokerto	3.161	3	2.775	2	2.440	2	3.000	3
244	P/W13	37	Kabupaten Malang	3.233	3	3.000	3	2.260	2	3.000	3
245	P/W13	38	Kabupaten Bangkalan	3.149	3	2.907	2	2.580	2	2.900	2
14			Kalimantan Barat								
246	P/W14	1	Kota Pontanak	3.354	3	3.060	3	2.360	2	3.000	3
247	P/W14	2	Kabupaten Landak	3.207	3	3.123	3	2.620	2	3.000	3
248	P/W14	3	Kabupaten Sintang	3.235	3	3.103	3	2.570	2	3.000	3
249	P/W14	4	Kabupaten Sanggau	3.070	3	2.000	2	2.000	2	3.000	3
250	P/W14	5	Kabupaten Kubu Raya	3.020	3	3.013	3	2.730	2	3.000	3
251	P/W14	6	Kota Singkawang	3.261	3	3.115	3	2.930	2	3.000	3
252	P/W14	7	Kabupaten Mempawah	3.176	3	3.130	3	2.850	2	3.000	3
253	P/W14	8	Kabupaten Sekadau	3.100	3	2.000	2	2.000	2	3.000	3
254	P/W14	9	Kabupaten Ketapang	3.040	3	2.000	2	2.000	2	3.000	3
255	P/W14	10	Kabupaten Kapuas Hulu	3.010	3	2.000	2	2.000	2	3.000	3
256	P/W14	11	Kabupaten Melawai	2.814	2	2.434	2	2.662	2	3.000	3
257	P/W14	12	Kabupaten Kayong Utara	2.220	2	2.000	2	2.000	2	3.000	3
258	P/W14	13	Kabupaten Bengkayang	2.200	2	2.000	2	1.800	1	2.710	2
259	P/W14	14	Kabupaten Sambas	3.008	3	2.570	2	2.360	2	3.000	3
15			Kalimantan Tengah								
260	P/W15	1	Kabupaten Kotawaringin Barat	3.072	3	2.800	2	2.780	2	3.000	3
261	P/W15	2	Kabupaten Kotawaringin Timur	3.029	3	2.613	2	2.836	2	3.000	3
262	P/W15	3	Kabupaten Lamandau	3.066	3	2.875	2	2.910	2	3.000	3
263	P/W15	4	Kota Palangka Raya	3.092	3	2.880	2	2.730	2	3.000	3
264	P/W15	5	Kabupaten Pulang Pisau	3.024	3	2.650	2	2.706	2	2.440	2
265	P/W15	6	Kabupaten Barito Selatan	3.001	3	2.413	2	2.820	2	3.000	3
266	P/W15	7	Kabupaten Gunung Mas	3.064	3	2.750	2	2.910	2	3.000	3
267	P/W15	8	Kabupaten Barito Utara	3.057	3	2.838	2	2.910	2	3.030	3
268	P/W15	9	Kabupaten Barito Timur	3.067	3	2.819	2	2.838	2	2.480	2
269	P/W15	10	Kabupaten Sukamara	3.066	3	2.831	2	2.910	2	3.000	3

Adapun sasaran "Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel" dengan indikator sasaran "Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Sesuai Standart" dengan capaian sebesar 36% (18 Perangkat Daerah) telah sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, bahwa Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP dilakukan terhadap Perangkat Daerah pengampu Sasaran program K/L atau sasaran OPD dari 30% sasaran strategis K/L/D, dengan jumlah minimal 2 (dua) sasaran strategis beserta seluruh sasaran kegiatan dan Rincian Output/Sub kegiatan. Pemilihan sasaran strategis mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan isu strategis pada K/L/D.

Berdasarkan arah Kebijakan Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu "Terwujudnya Kemandirian Ekonomi, Kemantapan Infrastruktur, Masyarakat Yang Sejahtera, Aman, Harmonis, Berkepribadian dan Berkebudayaan Serta Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik". Sehingga dari 30% sasaran strategis Pemerintah Daerah dipilih 8 (delapan) sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang diampu oleh 18 (delapan belas) Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1.5
Daftar Penetapan Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023

Bidang	Sasaran Strategis	Perangkat Daerah
Ekonomi	1. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2. Meningkatnya volume usaha sector industri dan perdagangan	3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kesejahteraan	3. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	4. Dinas Sosial dan PPA
Penguatan SDM Yang Berkualitas	4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda	5. Dinas Pendidikan 6. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
	5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk	7. Dinas PPKB 8. Dinas Kesehatan
Pembangunan infrastruktur	6. Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal	9. Dinas PUPR 10. Dinas Perhubungan
Reformasi Birokrasi	7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	11. BPKAD 12. BAPENDA 13. INSPEKTORAT 14. BAPPEDA 15. SETDA 16. DISKOMINFO 17. DINAS ARPUS
	8. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	18. BKPSDM

4) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Tercapai/Tidak Tercapai
1.	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Level Maturitas SPIP	100%	Tercapai
2.	Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	112.5%	Tercapai

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam merealisasikan kinerja tujuan dan kinerja sasaran Tahun 2023 tersebut antara lain :

- a) Memasukkan kegiatan pendampingan penilaian mandiri SPIP dan Penjaminan kualitas SPIP ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023
- b) Mengirim peserta sosialisasi dan bimbingan teknis "Perubahan Tata Cara Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur" pada tanggal 13 Juni – 14 Juni 2023 yang diikuti oleh perwakilan APIP dan Asesor Pemda (BAPPEDA dan BPKAD)
- c) Melaksanakan *Forum Group Discussion* Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 pada tanggal 16 Juni 2023 yang dihadiri oleh APIP, BPKAD, Bagian Organisasi dan BAPPEDA.
- d) Menyelenggarakan Bimtek Manajemen Risiko dalam Penyusunan CEE dan RSP Pemkab Nganjuk pada tanggal 21-22 Juni 2023 dengan mengundang seluruh perangkat daerah
- e) Melaksanakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri tentang Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada tanggal 3 Juli 2023 yang diikuti oleh perwakilan auditor pada masing masing lrbn.

- f) Melaksanakan Rapat Persiapan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 pada tanggal 5 Juli 2023 yang dihadiri oleh 18 Perangkat Daerah terpilih Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2023.
- g) Mengirimkan auditor untuk mengikuti diklat Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) orang pada tahun 2022 dan 2 (dua) orang pada tahun 2023
- h) Melaksanakan pendampingan terhadap 18 OPD terpilih penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.
- i) Melaksanakan pendampingan penyusunan Register Risiko (RSP dan RSO) 2004-2006 pada tanggal 8 s.d 24 Mei 2023
- j) Menyelenggarakan Bimtek Manajemen Risiko dalam Penyusunan CEE dan RSP Pemkab Nganjuk pada tanggal 21-22 Juni 2023 dengan mengundang seluruh perangkat daerah sebanyak 50 OPD di Ruang Rapat Anjuk Ladang Pemkab Nganjuk
- k) Menyelenggarakan workshop penilaian mandiri SPIP Terintegrasi bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur tanggal 21 s,d 22 Juli 2023 bertempat di éL Hotel Kartika Wijaya Batu, Jl. Panglima Sudirman No.127, Kota Batu dengan peserta 18 OPD terpilih penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi.

Adapun Penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mencapai target kinerja tujuan dan kinerja sasaran antara lain:

- a) Menginisiasi regulasi terkait pengelolaan risiko, diantaranya:
 - a. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
 - b. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/183/K/411.013/2023 Tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 - 2026
 - c. SE Bupati Nganjuk Nomor 700/595/411.200/2023 Tentang Dokumen Arahan Dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahunan
 - d. SE Bupati Nganjuk Nomor 700/596/411.200/2023 Tentang Dokumen Arahan Dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahun 2024-2026
- b) Terdapat Komitmen Kepala Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk beserta seluruh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk merealisasikan target Maturitas SPIP Level 3.

- c) Telah dilakukan Koordinasi internal dan kompetensi APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang memadai.
- d) Terjalannya koordinasi yang baik dengan Instansi Pembina yakni BPKP Perwakilan Jawa Timur dan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk
- e) APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk telah memiliki sertifikasi Pelatihan SPIP.
- f) Melaksanakan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP telah tepat waktu dan sesuai dengan jadwal dan arahan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk antara lain :

- 1. Kurangnya komitmen level top manajemen terkait Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko.
- 2. Kesadaran pemilik risiko (Perangkat Daerah) untuk mengidentifikasi risiko yang dimiliki masih rendah.
- 3. Belum didukungnya kegiatan penyelenggaraan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah.
- 4. Kurang optimalnya satuan Tugas (Satgas) SPIP Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPIP
- 5. Fungsi konsulting belum dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah secara optimal

5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk didukung sumberdaya anggaran untuk merealisasikan target sasaran strategis yang telah ditetapkan sebesar Rp11.750.366.689,- dengan realisasi sebesar Rp10.700.870.538,00 maka capaian kinerja anggaran sebesar 91,07%. Efisiensi penggunaan sumberdaya Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Level Maturitas SPIP	100	91,07	8,93%
2.	Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	112.5%	91,07	21,43%

Tingkat efisiensi anggaran belanja merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika dibandingkan capaian kinerja tujuan dan kinerja sasaran yang **"Telah Tercapai"** dengan realisasi anggaran 91,07% maka rata-rata capaian kinerja 106,25% hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian tujuan pembangunan khususnya pembangunan urusan pengawasan tahun 2023 telah digunakan dengan **"efektif dan efisien"**.

6) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1.7
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun. 2023

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah (90%)	90%	85,37%	94,85
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	90%	100%	111,11

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	100%
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100%	97,22%	97,22%
1.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54 org/bulan	51 org/bulan	94,44%
1.b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap	1 lap	100%
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%	94,44%	118,05%
2.a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	118 paket	118 paket	100%
2.b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54 orang	48 orang	88,89%
2.c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	54 orang	51 orang	94,44%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	119,84%	133,15 %
3.a	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100%
3.b	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100%
3.c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	4 paket	100%

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	
	3.d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100%
	3.e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	100%
	3.f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 lap	12 lap	100%
	3.g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 lap	86 lap	238,88
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan Pemrintaha Daerah	100%	100%	100%
	4.a	Pengadaan Mebel	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	55 unit	55 unit	100%
	4.b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	193 unit	245 unit	126,94 %
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa umum dan penunjang urusan perangkat daerah	90%	100%	111,11 %
	5.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 lap	4 lap	100%
	5.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 lap	4 lap	100%
	5.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 lap	4 lap	100%
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	90%	147,35%	163,72 %
	6.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeriksaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	19 unit	158,33 %
	6.b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	28 unit	28 unit	100%
	6.c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	104 unit	231,11 %

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	
	6.d	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	4 unit	100%
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase PKPT yang dilaksanakan	100%	90,75%	90,75%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Terselenggaranya pengawasan internal	100%	88,69%	88,69%
	1.a	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	3 lap	3 lap	100%
	1.b	Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 lap	7 lap	70%
	1.c	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	1 lap	1 lap	100%
	1.d	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 lap	124 lap	104,25
	1.e	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	75 lap	35 lap	46,66%
	1.f	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%
	1.g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP)	6 dok	6 dok	100%
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95%	87,5	92,1 %
	2.a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah ditangani	4 lap	1 lap	25%
	2.b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 lap	6 lap	150 %
C.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80%	56%	70%
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	100%	100%	100%

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%
1.b	Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi	90%	92,5%	102,77 %
2.a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	50 OPD	50 OPD	100%
2.b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	30 OPD	21 OPD	70%
2.c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 keg.	3 Keg	100%
2.d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	50 OPD	50 OPD	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk

Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Dari 2 (dua) program utama dan 1 (satu) program penunjang telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berorientasi hasil. Hal ini berdampak pada pencapaian kinerja. Berikut Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2023 ,sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui	Level Maturitas SPIP	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	94,85%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan
1	2	3	4	5	6
	Kualitas Pengawasan		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	118,05%
			Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	94,44%
2	Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PKPT yang dilaksanakan	90,75%
			Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya pengawasan internal	88,69%
			Sub.Kegiatan : 1. Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	46,66%
			2. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	100%
			Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	70%
			Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%
			Sub.Kegiatan : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	100%
			2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	100%
Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi	102,77			

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Sub Kegiatan: 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	100%

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mendukung capaian kinerja tujuan **"Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan"** dengan indikator **"Level Maturitas SPIP"**, Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Bimbingan Teknis / Sosialisasi / Workshop bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur kepada APIP dan Perangkat Daerah antara lain :

- a) Sosialisasi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
- b) Bimtek Manajemen Risiko dalam Penyusunan CEE dan RSP Pemerintah Kabupaten Nganjuk
- c) Sosialisasi Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPIP
- d) Workshop asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Satker SPIP serta Finalisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Dalam mencapai kinerja sasaran **"Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel"** dengan indikator sasaran **"Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart"**, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk didukung Program **"Penyelenggaraan Pengawasan"** dengan Kegiatan **"Penyelenggaraan Pengawasan Internal"** dan Sub Kejadiannya **"Pengawasan Desa"** dan **"Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut pemeriksaan APIP."**

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

1) Sub Kegiatan Pengawasan Desa

Kegiatan Pengawasan Desa merupakan kegiatan dalam upaya terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang akuntabel. Sesuai

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023, pengawasan desa dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi serta audit ketaatan. Tahun 2023 monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 75 (tujuh puluh lima) desa yang diprioritaskan pada pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2022 dan Audit Desa Sebanyak 12 Desa.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sekaligus dilaksanakan penilaian berdasar indikator WTP Desa sehingga pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi memiliki dua hasil, yakni laporan hasil monitoring dan evaluasi dan nilai atas pengelolaan keuangandes. Dari 75 desa yang dimonitoring dan dievaluasi diperoleh 55 desa untuk mendapatkan penghargaan berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah dengan kategori :

- a. Kategori Nindya 7 Desa
 - b. Kategori Madya 26 Desa .
 - c. Kategori Pratama 22 Desa
- 2) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pemeriksaan APIP

Kegiatan monitoring tindak lanjut bertujuan mengawal rekomendasi hasil pengawasan APIP maupun pemeriksaan BPK yang telah diberikan kepada Perangkat Daerah untuk memastikan apakah rekomendasi sudah dilaksanakan. Sampai dengan Semester I Tahun 2023 capaian tindak lanjut BPK yang selesai ditindak lanjuti sebesar 90,47% dengan nilai penyelamatan kerugian daerah sebesar Rp 27.268.773.305,41. Dalam upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP, **Inspektorat telah mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Data Pengawasan (SIP-WAS)**. SIP-WAS merupakan aplikasi berbasis *website* untuk mengelola data tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Dengan SIP-WAS *audite* dapat menyampaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan mudah dan cepat. Demikian juga dengan APIP dapat memantau sejauh mana rekomendasi ditindaklanjuti oleh *audite* secara *realtime*. Prosentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti sampai dengan akhir Tahun 2023 adalah sebesar 75,92% dengan nilai penyelamatan kerugian Daerah sebesar Rp1.171.711.993,-

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, dengan didukung dengan Kegiatan "Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan" dengan sub kegiatan "Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan" dan sub Kegiatan "Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan" dan Kegiatan "Pendampingan dan Aistensi" dengan Sub Kegiatan

a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah, KPK membangun sebuah system yang terintegrasi dan terkoneksi dengan KPK melalui MCP (monitoring centre for prevention) untuk memonitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata Kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Kegiatan MCP KPK Tahun 2023 merupakan salah satu kegiatan terencana Inspektorat Kabupaten Nganjuk dalam implementasi mitigasi atas risiko korupsi melalui pemantauan perbaikan terhadap 8 (delapan) asepek area intervensi rawan korupsi. Capaian MCP KPK sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar 56 dan akan terus ditingkatkan kecukupan dokumen sampai dengan ditutupnya penilaian.

1) Sub Kegiatan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan

Dari 173 Program Kerja Pengawasan yang rencanakan selama 1 tahun anggaran, realisasi sampai dengan TW IV penugasan pengawasan yang telah dilaksanakan sebanyak 157 penugasan pengawasan atau sebesar 90,75 dari target yang ditetapkan, tidak termasuk penugasan mandatory dan penugasan diluar PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan).

Dengan rincian sebagai berikut :

Irban	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Irban I	11	10	13	9	12	15	14	13
Irban II	8	9	8	5	10	9	11	8
Irban III	7	7	9	6	10	11	10	9
Irban IV	6	6	9	6	7	8	10	9
Irban V	4	4	6	4	3	4	5	5
Jumlah	36	36	45	30	42	47	50	44

Adapun penugasan pengawasan yang belum di laksanakan pada TW I s.d IV disebabkan bebarapa faktor diantaranya :

- a) Mandatory penugasan
- b) Kegiatan Tumpang tindih penugasan, adanya APIP yang mengikuti diklat bersamaan dengan jadwal penugasan.
- c) Perubahan Kebijakan Pengawasan .

2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Dalam rangka implementasi APIP dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pada pengelola keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk, pada Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan kegiatan klinik konsultasi atas pengelolaan dana desa di 20 Kecamatan dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Nganjuk, Dinas PMD Kabupaten Nganjuk dan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Klinik konsultasi dilaksanakan untuk Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *early warning system* (memberi peringatan dini) dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan perlu adanya layanan konsultasi keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

b) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

- Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja inspektorat adalah kegiatan pendampingan maturitas SPIP dan Pendampingan Kapabilitas APIP. Berdasarkan Surat Kepala Badan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.09.02/S.6130/PW13/6/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberitahuan Penetapan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk bahwa Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 berada pada level 3

B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan pada Tahun Anggaran 2023 untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk bersumber pada APBD Kabupaten Nganjuk TA. 2023 sebesar Rp11.750.366.689,00 dengan realisasi sebesar Rp10.700.870.538,00 atau 91,07% Dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN		Anggaran	Penyerapan	Sisa Pagu Anggaran	%
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.294.213.389	9.567.426.953	742.559.636	92,94
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.389.794.000	6.854.849.682	534.944.318	92,76
	Sub Kegiatan :				
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.380.824.000	6.845.924.682	534.899.318	92,75
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.970.000	8.925.000	45.000	99,50
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	605.905.000	560.616.454	45.288.546	92,53
	Sub Kegiatan :				
a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	65.636.000	65.123.000	513.000	99,22
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	388.942.000	355.199.704	33.742.296	91,32
c.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	151.327.000	140.293.750	11.033.250	92,71
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.816.170	493.873.679	37.942.491	92,87
	Sub Kegiatan :				
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.086.952	12.805.200	281.752	97,85
b.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.824.318	9.627.500	2.196.818	81,42
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.519.000	13.718.550	800.450	94,49
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.246.900	124.279.600	6.967.300	94,69

PROGRAM / KEGIATAN		Anggaran	Penyerapan	Sisa Pagu Anggaran	%	
	e.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.351.500	23.211.400	140.100	99,40
	f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.962.500	17.396.700	4.565.800	79,21
	g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.825.000	292.834.729	22.990.271	92,72
4		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	883.527.807	847.116.720	36.411.087	95,88
		Sub Kegiatan :				
	a.	Pengadaan Mebel	188.215.541	173.278.220	14.937.321	92,06
	b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	695.312.266	673.838.500	21.473.766	96,91
5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.975.000	208.627.318	38.347.682	84,47
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.075.000	5.592.800	3.482.200	61,63
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.200.000	127.211.678	14.988.322	89,46
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.700.000	75.822.840	19.877.160	79,23
6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	636.195.412	602.343.100	33.852.312	94,68
		Sub Kegiatan :				
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeriksaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.086.900	168.313.700	15.773.200	91,43
	b.	Pemeliharaan Mebel	18.000.000	16.960.800	1.039.200	94,23
	c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.240.000	31.226.200	16.013.800	66,10
	d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	386.868.512	385.842.400	1.026.112	99,73
B.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	670.134.500	479.170.585	190.963.915	71,50
1		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	559.054.500	442.659.785	116.394.715	79,18
		Sub Kegiatan :				
	a.	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	98.864.000	82.545.320	16.318.680	83,49

PROGRAM / KEGIATAN		Anggaran	Penyerapan	Sisa Pagu Anggaran	%	
	b.	Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah	81.010.000	60.092.500	20.917.500	74,18
	c.	Reviu Laporan Kinerja	18.255.000	12.404.000	5.851.000	67,95
	d.	Reviu Laporan Keuangan	46.749.000	13.003.000	33.746.000	27,81
	e.	Pengawasan Desa	68.680.000	42.480.000	26.200.000	61,85
	f.	Kerjasama Pengawasan Internal	21.826.000	21.659.500	166.500	99,24
	g.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	223.670.500	210.475.465	13.195.035	94,10
	2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	111.080.000	36.510.800	74.569.200	32,87
		Sub Kegiatan :				
	a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	33.400.000	18.013.500	15.386.500	53,93
	b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	77.680.000	18.497.300	59.182.700	23,81
C.		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	786.018.800	654.273.000	131.745.800	83,24
	1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	173.160.000	160.282.000	12.878.000	92,56
	a.	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	16.650.000	13.957.500	2.692.500	83,83
	b.	Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi pengawasan	156.510.000	146.324.500	10.185.500	93,49
	2	Pendampingan dan asistensi	612.858.800	493.991.000	118.867.800	80,60
	a.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	418.094.800	385.721.500	32.373.300	92,26
	b.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55.834.000	37.036.000	18.798.000	66,33
	c.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	119.218.000	65.992.500	53.225.500	55,35
	d.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	19.712.000	5.241.000	14.471.000	26,59
		TOTAL JUMLAH	11.750.366.689	10.700.870.538	1.049.496.151	91,07

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun Anggaran 2023 penyerapan anggaran per Sub Kegiatan sangat bervariasi dari persentase serapan anggaran tertinggi pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan serapan 99,50% dan serapan terendah pada Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar 23,81%. Secara keseluruhan Tahun Anggaran 2023 terdapat efisiensi anggaran dari pagu anggaran Rp.11.750.366.689,00 realisasi Rp10.700.870.538,00 atau 91,07%. Sehingga Tahun 2023 terdapat efisiensi Rp1.049.496.151,00 atau 8,93%

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sudah selaras dengan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018 – 2023. Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas - tugas yang menjadi tanggungjawabnya selaku penyelenggara pengawasan internal dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.

Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 setelah adanya penyempurnaan menetapkan :

1. Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan dengan indikator kinerja Level Maturitas SPIP target Level 3
2. Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart target 32%

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan " Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan" dengan indikator kinerja "Level Maturitas SPIP" target Level terealisasi level 3 capaian kinerja 100%.
2. Capaian Sasaran " Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel dengan indikator kinerja "Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Sesuai Standart" dengan target 32% terealisasi sebesar 36% capaian kinerja 112,5%.
3. Realisasi kinerja program dan anggaran Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Realisasi kinerja program dan Anggaran
Inspektorat Daerah Kab . Nganjuk Triwulan IV Tahun 2023

No.	Program	Indikator Capaian Program	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan	90	85,37	94,85	10.294.213.389	9.567.426.953	92,94

No.	Program	Indikator Capaian Program	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	Daerah Kab./Kota	Perangkat Daerah						
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PKPT yang dilaksanakan	100	100%	100	670.134.500	479.170.585	71,50
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80	56*	70%	786.018.800	654.273.000	83,24
JUMLAH						11.750.366.689	10.700.870.538	91,07

4.2 Permasalahan/hambatan dan Langkah yang diambil Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja

Tabel 4.2
Permasalahan/hambatan dan Langkah yang diambil
Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk untuk meningkatkan kinerja

No.	Permasalahan/Hambatan	Langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja
1.	Kurangnya komitmen level top manajemen terkait Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko.	Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
2.	Kesadaran pemilik risiko untuk mengidentifikasi risiko masih rendah.	Menyelenggarakan Bimtek Manajemen Risiko dalam Penyusunan CEE dan RSP Pemkab Nganjuk dengan mengundang seluruh perangkat daerah
3.	Belum didukungnya kegiatan penyelenggaraan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah.	Berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD terkait pendanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP pada masing-masing Perangkat Daerah
4.	Kurang optimalnya Satuan Tugas (Satgas) SPIP Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPIP	1. Menyusun struktur pengelola risiko tingkat pemerintah daerah 2. Melaksanakan Workshop Bagi Satuan Tugas dan Asesor Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

No.	Permasalahan/Hambatan	Langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja
5.	Fungsi konsulting belum dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah secara optimal	Melaksanakan klinik konsultasi

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, kritik dan saran kami jadikan pertimbangan untuk perbaikan penyusunan laporan sehingga mampu memberikan informasi yang tepat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan

Nganjuk, 16 JAN 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010